

HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL



DOSEN PEMBIMBING

**Satria Unggul Wicaksana Prakasa
S.H.,M.H.**

OLEH:

DAYU KETUT WIA DINATA

NIM. 2014101033

3A

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU
SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN
GANESHA SINGARAJA
2021**

ANALISIS KEBIJAKAN THAILAND DALAM SENGKETA PERBATASAN DENGAN KAMBOJA PADA TAHUN 2008

ABSTRAK

Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja mengenai kuil Preah Vihear terjadi kembali pada tahun 2008. Hal ini dipicu karna pendaftaran kuil Preah Vihear ke UNESCO sebagai salah satu warisan dunia. Pendaftaran kuil Preah Vihear ke UNESCO merupakan tahap baru mengenai hubungan antara Thailand dan Kamboja mengenai konflik perbatasan. Disisi Thailand, konflik yang muncul dipicu karna situasi dan kondisi domestik Thailand yang tidak stabil. Gerakan nasionalis PAD di Thailand menolak pendaftaran kuil Preah Vihear ke UNESCO. Gerakan PAD menuduh pemerintah Samak telah menjual tanah milik Negara. Maka pemerintah Thailand membuat kebijakannya atas tekanan dari domestiknya.

ABSTRACT

Border dispute between Thailand and Cambodia was erupted in 2008. This was triggered by Cambodia's government to registration Preah Vihear temple to the UNESCO as a world heritage list. The register of Preah Vihear temple to the UNESCO as a world heritage list was a new phase of Thailand and Cambodia relations towards the border dispute. The dispute was also generated by Thailand's domestic situation. The Thai nationalist group PAD rejected the registration of Preah Vihear temple to UNESCO. The PAD accused Samak's government of selling the nation. It means that the Thai government formulated its policy upon the pressure from domestic dynamics.

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Konflik perbatasan yang berawal dari ketidakjelasan batas-batas wilayah antara Thailand dan Kamboja pada peta yang dibuat berdasarkan pemerintahan Prancis dan pemerintahan Siam (Thailand) yaitu meliputi wilayah kuil Preah Vihear menghadapkan kedua Negara pada konflik perbatasan. Kuil Preah Vihear adalah wilayah yang diperebutkan oleh dua anggota dari Negara Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) yaitu Thailand dan Kamboja. Letak kuil Preah Vihear ini di puncak pegunungan Dangrek dengan

ketinggian 525 meter atau 657 meter di atas permukaan air laut, wilayah ini tepatnya terletak diantara wilayah perbatasan Kabupaten Kantharalak (Amphoe) Provinsi Si Sa Ket, timur laut Thailand dan Kabupaten Choam Khasant, Provinsi Preah Vihear, Utara Kamboja. Wilayah Preah Vihear merupakan wilayah yang memiliki banyak peninggalan sejarah berupa situs candi kuno hingga 228 candi.

Pada tahun 1953, setelah Kamboja meraih kemerdekaan, lalu Thailand memperkuat pembelaannya di perbatasan dekat kuil Preah Vihear dengan adanya pos polisi di Pegunungan Dangrek. Hal ini

diprotes oleh pemerintah Kamboja di bawah Perdana Menteri Sihanouk. Beberapa negosiasi yang dilakukan dari tahun 1953 sampai 1958 tidak mencapai hasil yang positif. Karena itu, Kamboja memutuskan untuk mengirim kasus ini ke International Court of Justice (ICJ). Proses penyelesaian dimulai dengan mendengarkan masing-masing pendapat dari kedua Negara. Berdasarkan penjelasan dari kedua Negara pada sidang ICJ tentunya kedua Negara tersebut berasumsi bahwa kuil Preah Vihear adalah bagian dari Negaranya. Selain mendengarkan masing-masing pendapat dari kedua Negara, putusan yang diambil ICJ berdasarkan sejarah dan fakta melalui perjanjian perbatasan yang dilakukan antara Kerajaan Siam dan Prancis pada tanggal 13 Februari 1904 mengenai cakupan ketentuan yang berkaitan dengan wilayah pegunungan Dangrek Timur dimana Kuil Preah Vihear berada.

Konflik ini sempat meredam pasca putusan 1962 kedua Negara tidak pernah membahas lagi mengenai konflik perbatasan Preah Vihear. Namun, eskalasi konflik antara Thailand dan Kamboja terjadi lagi pasca diputuskannya Kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia milik Kamboja pada tahun 2008. Konflik yang kini timbul diperparah dengan adanya ketidakstabilan politik domestik Thailand. Wilayah yang disengketakan tersebut adalah wilayah disekitar kuil Preah Vihear yaitu tanah 4.6 kilometer persegi. Thailand dalam klaim yang dilakukan terhadap tanah yang menjadi tuntutan tersebut berdasarkan pada interpretasi mengenai putusan ICJ di 1962 yang hanya terbatas pada kedaulatan atas wilayah Kuil Preah Vihear, akan tetapi garis batas itu tidak memiliki status hukum dari keputusan yang telah dikeluarkan. Konflik yang telah usai kini memasuki era baru,

yang diperebutkan adalah tanah yang berada di sekitar yang mendekati dengan wilayah perbatasan Thailand. Tanah ini yang dituntut oleh pihak Thailand atas kepemilikannya sedangkan putusan dari ICJ sudah jelas bahwa kuil Preah Vihear menjadi milik Kamboja.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa Thailand memunculkan isu Preah Vihear kembali pada tahun 2008?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji mengenai konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja adalah dengan menggunakan metode dari penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan serta menganalisa persepsi, pemikiran seseorang secara individu maupun kelompok. Melalui beberapa deskripsi yang digunakan tujuannya untuk menemukan penjelasan yang akan mengarahkan pada kesimpulan. Hal ini mengandung pengertian bahwa penelitian kualitatif mempelajari sesuatu serta berusaha untuk membuat deskripsi yang sesuai dengan yang dipersepsikan oleh subyek. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini guna memahami dari situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis hingga teorinya.

D. KERANGKA TEORI

Konflik perbatasan wilayah antara Thailand dan Kamboja pada tahun 2008

Thailand dan Kamboja memiliki perspektif yang berbeda atas penggambaran batas-batas dari wilayahnya termasuk pembatasan wilayah tentang kuil Preah Vihear. Kuil ini merupakan cerminan dari

agama hindu yang dibangun sejak abad ke 11 yang menjadi penyebab munculnya konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Konflik tersebut sebenarnya sudah terselesaikan oleh pihak ICJ pada tahun 1962, setelah putusan mengenai konflik tersebut kedua Negara sepakat bahwa tidak tidak menungkit kembali mengenai konflik yang telah diperdebatkan sebelumnya. Ketika Kuil Preah Vihear diberikan status sebagai warisan dunia pada tahun 2008, ternyata membawa perubahan yang baru terhadap hubungan antara Thailand dan Kamboja. Hubungan antara kedua negara tersebut sempat menegang dalam beberapa tahun dan kembali membahas konflik tentang Kuil Preah Vihear, konflik yang terjadi pada tahun 2008 tidak jauh berbeda dengan konflik yang terjadi sebelumnya mengenai letak wilayah dari Kuil Preah Vihear bagi negara Thailand dan Kamboja.

Mengenai isu perbatasan antara Thailand dan Kamboja tentang kuil tersebut bukan hanya terjadi pada tahun 2008 saja, melainkan sudah terjadi ketika Negara Prancis mengkolonialisasi Kamboja. Konflik yang terjadi antara kedua Negara tersebut sebenarnya sudah diselesaikan oleh pihak ICJ ditahun 1962 silam. Putusan yang dibuat oleh ICJ membuat kuil Preah Vihear termasuk kedalam kedaulatan Kamboja pada saat itu. Selama beberapa tahun selanjutnya kedua negara tersebut tidak pernah lagi membahas konflik tentang perbatasan kuil tersebut. akan tetapi, pendaftaran kuil tersebut ke UNESCO sebagai warisan dunia merupakan tahapan baru untuk hubungan kedua negara tersebut. Pendaftaran kuil tersebut telah dipersiapkan oleh Kamboja dari bulan Oktober tahun 2001. Kamboja sendiri telah membuat proposal untuk mendaftarkan kuil Preah Vihear agar

dinobatkan sebagai warisan dunia milik Kamboja pada tahun 2008. Kuil tersebut secara kultural dan historis bagi orang Kamboja memandangnya sebagai ikon kemegahan budaya dari kerajaan Khmer Merah. Kuil tersebut melambangkan sejarah Kamboja yang berfungsi sebagai representasi identitas nasional, kuil tersebut juga mencakup unsur-unsur Agama Hindu yang merupakan agama dari raja-raja Khmer Merah pada saat itu.

Pada awal pemerintahan Thailand dibawah Perdana Menteri Samak Sundarajev memberikan dukungan penuh terhadap pendaftaran kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia pada tahun 2008 hanya jika tidak mengganggu daerah perbatasan Negara Thailand yang berada di sekitaran area kuil Preah Vihear dikarenakan tempatnya yang sangat berdekatan dengan perbatasan Thailand. Kemudian pada tanggal 22 Mei tahun 2008, Noppadon Pattama sebagai Menteri Luar Negeri dari Negara Thailand yang melakukan tugasnya dengan menghadiri pertemuan dengan pihak Kamboja dan UNESCO untuk membicarakan pendaftaran kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia di Negara Paris, melalui pertemuan tersebut telah memperlihatkan bahwa Thailand sepenuhnya mendukung atas pendaftaran tersebut. Noppadon Pattama juga sudah menandatangani surat yang berarti bahwa ia setuju dengan pendaftaran kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia.

Negara Thailand harus mengambil konsekuensi atas disetujuinya pendaftaran kuil sebagai warisan dunia di tahun 2008 yang berdampak pada situasi politik domestic Negaranya. Isu ini kemudian dimanfaatkan oleh partai oposisi yaitu Partai Demokrat serta diiringi dengan kebangkitan

dari kerakan nasional PDAThailand yang tidak menyetujui dan mereka menolak kebijakan yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri Samak Sundarajev. Isu mengenai perbatasan kuil Preah Vihear digunakan oleh pihak mereka dengan menuduh bahwa pemerintah telah menjual tanah milik negaranya kepada pihak Kamboja. tanah yang dimaksud oleh PAD adalah tanah seluas 4.6kilometer persegi. Wilayah yang dimaksudkan adalah tanah yang berada di sekitaran area kuil, bahkan Noppadon Pattama disebut oleh PAD sebagai penghianat oleh Thailand karena telah menandatangani surat persetujuan atas dimasukkannya kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia. Bukan hanya itu, PAD juga menilai bahwa Noppadon dan Perdana Menteri Samak memiliki konsesi bisnis di Negara Kamboja dalam persetujuannya mengenai pendaftaran kuil sebagai warisan dunia pada tahun 2008. Gerakan Nasionalis PAD berdemonstrasi di dekat kuil yang menyebabkan situasi semakin kacau di daerah perbatasan. Partai Demokrat sebagai partai oposisi mendukung Gerakan nasionalis dari PAD dalam proses demonstrasi yang dilakukan untuk menggulingkan pemerintah Samak pada saat itu. Bahkan dalam demonstrasi tersebut ada beberapa partai Demokrat yang ikut turun ke jalan bergabung dengan PAD. Dibawah tekanan public yang sangat tinggi akhirnya Samak Sundarajev harus mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Thailand pada tahun 2008, lalu digantikanlah oleh Somachai Wongsamat. Pergantian tersebut tidak membuat PAD berhenti dalam melakukan demonstrasi bahkan mereka terus menerus berdemonstrasi dengan menduduki gedung pemerintah yang pada akhirnya Perdana Mentri Somachai juga

mengundurkan diri dari jabatannya yang terbilang sangat singkat.

Thailand dalam pergantian Perdana Menterinya memiliki kebijakan yang berbeda terkait isu yang ada. Berbeda dengan Samak yang menyetujui proses pendaftaran kuil serta Noppadon selaku Perdana Menteri Luar Negeri menandatangani atas dukungan Thailand terhadap kuil tersebut sebagai warisan dunia, sementara menurut Abhisit dengan adanya putusan UNESCO yang akan menetapkan kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia akan memperburuk hubungan antara Thailand dan Kamboja. Disisi lain, Abhisit juga menggunakan motif historis atas teori Thailand. Motif dari teori mengenai kuil Preah Vihear di masa lalu yang dimana kuil tersebut pernah menjadi bagian dari wilayah Thailand. Melalui motif historis tersebut membuat semakin banyaknya masyarakat Thailand yang mendukung kebijakan tersebut, hal inilah yang menjadikan pemerintah Thailand akan semakin concern atau menjadi tuntutan untuk membahas perbatasan dari kuil Preah Vihear. Setelah beberapa bulan Abhisit menjabat sebagai Perdana Menteri, lalu terjadilah baku tembak antara kedua Negara tersebut di sepanjang perbatasan kuil.

Thailand dan Kamboja memiliki perspektif yang berbeda atas penggambaran batas-batas dari wilayahnya termasuk pembatasan wilayah tentang kuil Preah Vihear. Kuil ini merupakan cerminan dari agama hindu yang dibangun sejak abad ke 11 yang menjadi penyebab munculnya konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Konflik tersebut sebenarnya sudah terselesaikan oleh pihak ICJ pada tahun 1962, setelah putusan mengenai konflik tersebut kedua negara sepakat bahwa

tidak tidak menungkit kembali mengenai konflik yang telah diperdebatkan sebelumnya. Ketika Kuil Preah Vihear diberikan status sebagai warisan dunia pada tahun 2008, ternyata membawa perubahan yang baru terhadap hubungan antara Thailand dan Kamboja. Hubungan antara kedua negara tersebut sempat menegang dalam beberapa tahun dan kembali membahas konflik tentang Kuil Preah Vihear, konflik yang terjadi pada tahun 2008 tidak jauh berbeda dengan konflik yang terjadi sebelumnya mengenai letak wilayah dari Kuil Preah Vihear bagi negara Thailand dan Kamboja.

Keputusan UNESCO mengenai kuil Preah Vihear sebagai warisan dunia mendapat reaksi negative dari Thailand hal ini juga berdampak bagi hubungan antara kedua negara tersebut. Kedua negara inipun sudah mendapat tekanan dari pihak internasional untuk segera menyelesaikan konflik tersebut. Usaha dalam usahanya membela kedaulatan bukan hanya meminta bantuan ASEAN tetapi juga mahkamah internasional PBB. Dari proses mediasi sudah dilalui oleh kedua negara tersebut tetapi belum juga mendapatkan titik terang, dan akhirnya di tahun 2013 ICJ meminta Thailand dan Kamboja harus bekerja sama melindungi warisan dunia dari UNESCO,

kedua negara wajib untuk tidak melakukan tindakan yang disengaja yang dapat merusak kuil Preah Vihear. Disamping itu, setelah putusan ini dikeluarkan kedua negara wajib untuk mematuhi dan pemahaman atas wilayah sekitar kuil Preah Vihear yang dituntut oleh pihak Thailand sudah terlihat jelas bahwa interpretasi ulang dari putusan ICJ membuat kuil Preah Vihear beserta wilayah sekitarnya masuk kedalam kedaulatan Kamboja dan Thailand harus menghormatinya.

E. KESIMPULAN

Upaya yang dilakukan ASEAN untuk menyelesaikan sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja adalah upaya diplomasi. Upaya diplomasi sangat diutamakan untuk menghindari cara kekerasan dan militer. Indonesia selaku pemegang mandat telah melakukan “shuttle diplomacy”. Selain itu juga telah digelar Informal ASEAN dengan agenda tunggal pembahasan penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja. Kedua negara yang bertikai telah sepakat dalam tiga koridor, yaitu dialog perdamaian melalui mekanisme TAC, gencatan senjata permanen dan pelibatan ASEAN dalam menengahi konflik antara Thailand dan Kamboja.